

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- INVESTOR IND.
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL **AGST** SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 **18** 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 15

TAHUN 2004

Tim Independen Kasus Buyat:

Benjolan di Tubuh Bukan Gejala Minamata

Manado, Sinar Harapan

Berdasarkan pengamatan fisik dan hasil diagnosis dokter terhadap 300 lebih pasien yang berasal dari Desa Buyat, Kecamatan Kotambunan, Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) yang bermukim di kawasan Buyat Pante Lakban (dusun jauh dari Desa Ratatotok Timur), Kecamatan Ratatotok, Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel), tidak ditemukan adanya gejala penyakit minamata.

Penyakit minamata tersebut sebelumnya diklaim warga setempat akibat terkontaminasi zat beracun merkuri (Hg) atau arsenik (As) dari perusahaan tambang PT Newmont Minahasa Raya (NMR).

Menurut salah satu anggota Tim Independen Kasus Teluk Buyat, dr Joy Rattu, PhD, yang dihubungi SH di Manado, Selasa (17/8), dari hasil pengamatan fisik maupun diagnosis terhadap ratusan warga setempat, tim independen tidak menemukan indikasi penyakit mematikan itu. "Jenis penyakit yang diderita para pasien adalah penyakit umum yang juga sering terjadi di daerah-daerah lain seperti infeksi saluran pernafasan atas (ISPA), penyakit kulit, alergi, hipertensi dan penyakit umum lainnya," kata Ketua Program Pascasarjana Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado itu.

Disinggung soal benjolan-benjolan di beberapa anggota tubuh pasien, Rattu menjelaskan, itu bukan karena

terkontaminasi merkuri atau arsenik yang berujung pada gejala penyakit minamata. Menurut dia, benjolan itu adalah jenis tumor di jaringan lemak (*lipoma*) dan tumor di tendon (*atheroma*). "Benjolan tersebut bukan merupakan gejala penyakit minamata atau penyakit aneh seperti yang digembar-gemborkan media cetak dan elektronik selama ini. Benjolan semacam itu bisa kita temukan di daerah-daerah lain juga, dan bukan hanya terdapat di Buyat atau Ratatotok. Saya sendiri tidak mengerti apa yang dimaksud dengan penyakit aneh itu. Sebab faktanya, tidak ada penyakit aneh. Yang ada hanyalah penyakit umum," tegas Rattu yang pernah menjadi dokter Timnas Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSD) itu.

Menurut sepengetahuannya, gejala penyakit minamata di Jepang adalah pasien mengalami kejang-kejang pada beberapa bagian tubuh, tidak dapat mengontrol gerakan sendiri, kehilangan rasa pada ujung jari kaki dan tangan, sulit

bicara, sulit mendengar dan melihat. Pendeknya, satu penyakit yang menyerang sistem saraf. Malahan pada orang-orang tertentu yang cukup parah, akan mengalami kerusakan pada sistem saraf yang membuat mereka terlihat seperti orang gila, dan akhirnya berujung pada kematian. Penyakit ini juga bersifat degeneratif (menurun).

"Dari ratusan pasien yang diperiksa dan didiagnosa itu, tidak ada gejala seperti penyakit minamata itu," tegas Rattu. Ia mengakui, dari ratusan pasien yang diperiksa, pihaknya menemukan sepuluh lebih kasus benjolan. "Untuk menangani lebih lanjut para pasien itu, kami merujuknya kepada dokter bedah. Sebab para pasien itu harus menjalani proses operasi kecil, dan ini harus dilakukan di RS Prof-Dr RD Kandou (dulunya RSUP Manado-red)."

Dikatakan, penyakit minamata adalah suatu keracunan merkuri pada orang yang memakan ikan yang tercemar. Penyakit kulit bisa karena alergi, jamur, kebersihan atau pola hidup, udara yang kotor, infeksi ataupun dari nyamuk. Sehingga kalau ada dugaan ikan yang tercemar merkuri harus diteliti di laboratorium.

Analisis Biologis

Sementara Ir Engel Pandey menyangkan belum ada pembuktian ilmiah yang sah bahwa gejala penyakit minamata yang menimpa warga di Buyat sudah positif sebagai gejala klinis akibat kadar

merkuri yang berlebihan di perairan Buyat. Gejala itu mirip dengan yang terjadi di Minamata, Jepang. "Selama ini mereka (PT NMR) hanya melakukan indikator analisis pendekatan secara kimiawi. Hanya mengambil sampel sehingga sering terjadi pertentangan. Coba mereka membuktikannya sesuai analisa biologis, pasti lebih akurat," kata pakar Ekotoksikologi (pengaruh racun terhadap lingkungan) dari Fakultas Perikanan dan Kelautan Unsrat Manado itu. Master lulusan Newcastle Upon Tyne University, Inggris, ini menjelaskan bahwa indikator analisa biologis adalah menyangkut penelitian yang dilakukan langsung pada mahluk hidup yang ada di perairan itu.

Misalnya pada gastropoda dan moluska. "Logam berat itu kan tidak bisa disekresi (keluar), sehingga tertimbun dalam tubuh mahluk-mahluk hidup tersebut. Dan penyebabnya adalah siklus hidup dan rantai makanan, moluska dimakan ikan kecil, ikan kecil dimakan ikan besar, dan ikan besar dimakan manusia," jelas Asisten Direktur III Pascasarjana Unsrat ini.

Sementara itu, anggota tim independen lainnya, Prof dr Winsy Warouw, menambahkan, kasus Buyat hanya merupakan sindrome di mata masyarakat. Padahal menurut dokter spesialis kulit dan kelamin dari Fakultas Kedokteran Unsrat itu, sampai saat ini kajian ilmiah yang diharapkan bisa menetralsir kondisi di wilayah tersebut belum juga ada. (nov)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- INVESTOR IND.
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 UMUM

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

HALAMAN : 4

TAHUN 2004

Tajuk Rencana

RAPBN 2005

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2005 yang diajukan Presiden Megawati Soekarnoputri kepada Dewan Perwakilan Rakyat 16 Agustus lalu mengundang beberapa kritik. Ketua Dewan Pertimbangan Kamar Dagang dan Industri Indonesia Aburizal Bakrie menilai RAPBN 2005 tidak memberikan stimulus fiskal untuk pembangunan ekonomi dan dunia usaha. Ia dianggap tidak akan menciptakan perubahan yang signifikan, termasuk untuk perbaikan fiskal. Komentar lain untuk RAPBN ini menganggap bahwa angka-angka di dalamnya tidak realistis. Inflasi 5,5%, pertumbuhan ekonomi 5,4%, suku bunga Sertifikat Bank Indonesia 3 bulan 6,5%, dan kurs Rp 8.600/1US\$, dinilai sebagai asumsi yang tak akan mudah dicapai.

Dalam tahun depan tak ada kenaikan gaji pegawai negeri. Itu berarti, tidak terjadi perbaikan kesejahteraan untuk seluruh aparatur negara. Perkembangan sektor swasta masih tetap menjadi tanda tanya dalam semua segi, baik dalam kemampuan menyerap tenaga kerja maupun dalam hal memperbaiki kesejahteraan karyawan. Daya beli masyarakat yang sekarang lemah, tampaknya tak akan mengalami perbaikan pada tahun depan. Kenaikan belanja pemerintah hanya 5,5% dibandingkan dengan APBN 2004, hampir sama dengan angka inflasi yang diasumsikan. Seandainya kelak target inflasi itu tercapai, kenaikan belanja pemerintah itu tetap tak akan bermakna apa-apa, dan akan lebih buruk jika nanti angka inflasi tersebut justru lebih besar dari itu.

Bagaimanapun ini adalah anggaran yang disusun sebuah pemerintahan yang berkemungkinan akan dijalankan oleh pemerintahan yang lain. Jika pemilihan presiden 20 September nanti membuahkan kemenangan bagi Megawati, beberapa segi yang tidak realistis dalam RAPBN itu perlu direvisi oleh kabinet yang dia susun nanti.

Peranan pajak dan rasio pajak yang diperlihatkan dalam RAPBN 2005 memerlukan peninjauan-ulang. Dalam rancangan yang diajukan Senin lalu, tidak terlihat upaya serius pemerintah untuk memperbaiki peran pajak dalam anggaran. Upaya mengurangi ketergantungan pada utang luar negeri pun perlu diperiksa lagi dan membutuhkan kebijaksanaan yang lebih jelas. Privatisasi juga demikian. Anggaran subsidi bahan bakar minyak di luar minyak tanah— adalah aspek lain yang membutuhkan pertimbangan yang masuk akal, untuk menuju anggaran yang lebih sehat. Semua itu memerlukan kebijaksanaan politik yang sesuai dengan janji-janji yang ditayangkan pada masa kampanye pemilihan umum.

Kini untuk berlangsungnya investasi agar tercipta lapangan kerja, peranan swasta tetap diharapkan. Presiden Megawati menyerukan kepada investor agar membawa pulang dana yang ditaruh di luar negeri. Tapi untuk merangsang kedatangan modal, seruan saja tentu tidaklah cukup. Ia harus disertai kebijaksanaan yang membuat pemodal percaya akan keamanan investasinya dan prospek mencetak laba. Kebijakan dan kemauan politik pemerintah yang akan datang —termasuk pemberantasan korupsi— akan banyak menentukan kegairan investasi itu.

Seandainya Susilo Bambang Yudhoyono yang meraih kemenangan, dia harus bekerja dengan APBN ini, yang disusun pemerintahan sekarang dan disahkan parlemen yang sekarang. Kebutuhan untuk revisi itu agaknya akan lebih tinggi. Mewujudkan angka pertumbuhan 5,5% memerlukan kebijaksanaan lain, baik dalam hal anggaran maupun kebijaksanaan nonanggaran buat pendukungnya.

APBN 2005 agaknya kelak ia akan mengalami koreksi sebagai implikasi perubahan politik. Seandainya memang era 2004-2009 tidak untuk Megawati lagi, presiden dan kabinet baru mungkin akan memperbaikinya. Apabila masih Megawati yang di sana, dia pun harus memperhitungkan dinamika politik parlemen baru untuk dapat bekerja lebih tenang dengan APBN yang lebih pasti.

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- INVESTOR IND.
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
HALAMAN: B.2 TAHUN 2004

PTTEP & CSFB akan lepas saham Medco

JAKARTA (Bisnis): PTT Exploration & Production Pcl, produsen gas terbesar kedua di Thailand, mempertimbangkan untuk melepas 34,2% sahamnya di PT Medco Energi International Tbk.

Menurut Presiden PTT Exploration Maroot Mrigadat yang juga komisaris di Medco, perusahaan yang dipimpinnya dan Credit Suisse First Boston (CSFB) kemungkinan akan bergabung menjual saham mereka di Medco. CSFB diketahui memiliki 17% saham Medco.

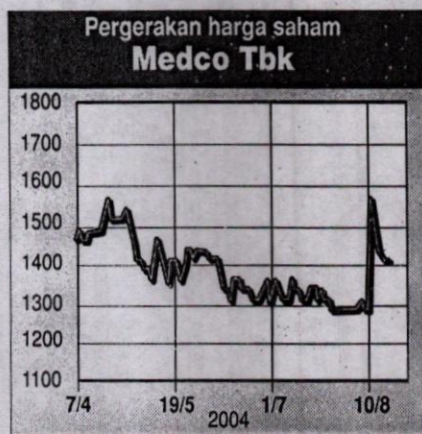
Perusahaan Thailand itu membayar US\$225 juta pada 2001 untuk membeli saham Medco.

PTT Exploration akan menggunakan dana hasil penjualan saham itu untuk diinvestasikan di ladang minyak dan gas di Indonesia, kata Maroot seperti dikutip *Bloomberg* tadi malam.

Indian Oil Corp., perusahaan kilang minyak terbesar di India, disebutkan akan membayar US\$600 juta untuk saham Medco tersebut, seperti dilaporkan *Financial Express*, India, mengutip sumber pejabat perusahaan itu.

Direktur Keuangan Medco Sugiharto yang diminta konfirmasinya tadi malam mengatakan belum mendapatkan perintah yang menyatakan PTT Exploration akan menjual sahamnya. "Kalau harus didisclose ke publik, pada waktunya akan kami *disclose* [buka]."

Dia menduga rencana pelepasan sa-



ham tersebut terjadi di seputar memegang saham New Links Energy Resources Limited, pemegang 85,5% saham Medco. Hal itu dinilainya sebagai sesuatu yang biasa.

Mengenai tawaran Indian Oil sebesar US\$600 juta atas saham PTT Exploration yang akan dilepas tersebut, dia menegaskan hal itu terlalu dini untuk dikomentari. Selain itu, nilainya terlalu besar. "Itu sama dengan kapitalisasi pasar Medco."

Dalam laporan tahunan 2003 Medco disebutkan sebagai komisaris Maroot mempunyai tugas utama yakni pengawasan dan mengontrol akuisisi lapangan minyak dan gas, termasuk aktivitas eksplorasi dan produksi. Dia memulai karirnya di PTT Exploration sebagai *vice presiden production* pada 1989.

Saham Medco pada perdagangan kemarin ditutup di level Rp1.400 per saham. Harganya sempat mencapai Rp1.550 pada 11 Agustus 2004, naik dari posisi awal bulan yang bertengger di Rp1.275. Pada awal tahun ini, tepatnya 16 Januari 2004, harganya sempat menyentuh level tertinggi yakni Rp1.725.

PTTEP rugi

PTT Exploration yang berbasis di Bangkok kehilangan 109,9 juta baht dari beberapa investasinya, termasuk di Medco pada kuartal pertama 2004 setelah mencatat laba 169,2 juta baht pada periode yang sama tahun lalu.

Medco pada 2 Agustus 2004 mengumumkan penurunan laba pada semester I/2004 sebesar 19% menjadi US\$27,08 juta karena kenaikan biaya produksi. Produksi minyak mentah turun antara 58.000 - 60.000 barel per hari tahun ini dari 70.000 barel per hari tahun lalu.

PTT Exploration juga merencanakan untuk mengeksplorasi minyak dan gas di beberapa negara seperti Uzbekistan bersama dengan OAO Gazprom—produsen gas alam terbesar dunia. PTT juga kemungkinan akan mengeksplorasi ladang minyak di Iran dan Libya.

"Kami tengah membangun satu hubungan dengan Gazprom, yang akan membuka jalan untuk eksplorasi di bekas Uni Soviet," kata Maroot.

Harga saham PTT Exploration naik 0,7% menjadi 286 baht di Bursa Bangkok pada perdagangan kemarin. (msw)

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- INVESTOR IND.
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 5

TAHUN 2004

Buyat Dan Kelayakan Investasi

Oleh Tri Arya Dhyana K

Kontroversi tentang adanya pencemaran pembuangan limbah logam berat di lingkungan Teluk Buyat makin hari makin menghangat. Berbagai statement dari beberapa pihak yang berkepentingan secara bergantian muncul di media massa.

Perkembangan terakhir, PT NMR yang diduga sebagai sumber pencemaran Teluk Buyat dalam siaran persnya Selasa (17/8) berencana akan mengakhiri produksinya pada 31 Agustus mendatang. Penghentian produksi itu sudah disetujui Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.

Rencana penutupan PT NMR ini sebagai tindak lanjut dari himbauan Mabes Polri yang meminta agar PT NMR menghentikan operasinya setelah timnya yang diturunkan di lapangan menyimpulkan bahwa Teluk Buyat diduga telah tercemar logam berat. Kemudian hasil pemeriksaan Laboratorium DKI juga menyimpulkan bahwa empat warga Dusun Buyat Pantai, Desa Ratatotok Timur, Kecamatan Ratatotok, Kabupaten Minahasa Selatan positif terkontaminasi berbagai logam berat, seperti merkuri, arsen, timbal, kadmium dan selenium.

Terlepas dari itu semua, kasus Buyat sebenarnya merupakan perwujudan dari tarik-menarik kepentingan antara kepentingan ekonomi dengan kepentingan kelestarian lingkungan. Dan, seperti biasanya kepentingan ekonomilah yang lebih dikedepankan karena secara *real* jangka pendek akan lebih dirasakan manfaatnya bagi masyarakat luas, walau kenyataannya yang lebih merasakan keuntungan ekonomi tersebut hanyalah segelintir orang saja.

Kasus Buyat muncul setelah banyak warga Minahasa menderita penyakit kejang, gatal dan benjolan pada bagian tubuhnya sejak 1999, atau tiga tahun setelah PT NMR beroperasi dan membuang tailing ke Teluk Buyat. Penelitian yang telah dilakukan untuk membuktikan pencemaran ini antara lain; hasil penelitian Walhi tahun 2001 dan 2002 juga menyebutkan bahwa kandungan logam berat di kawasan Teluk Buyat tergolong tinggi. Sementara hasil penelitian Unsrat pada Februari 2004 menyimpulkan perairan Teluk Buyat telah terkontaminasi logam merkuri akibat penambangan emas. Hal itu dikaitkan dengan hasil tes darah terhadap empat warga Buyat di FMIPA UI, baru-baru ini yang menunjukkan kadar merkuri sangat tinggi.

Namun yang menjadi permasalahan saat ini adalah sumber dari limbah tersebut, di mana masing-masing pihak yang berpotensi untuk menjadi sumber limbah tersebut saling berkilah bukan sebagai penyebab dari pencemaran tersebut. Beberapa pihak yang berpotensi sebagai sumber limbah pencemaran tersebut, antara lain PT NMR dan Pertambangan Rakyat yang berlokasi di Ratatotok. Namun kedua pihak mempunyai argumen pembenaran masing-masing. PT NMR mengklaim bahwa telah dilengkapi dengan AMDAL dan limbah yang dihasilkan masih sesuai dengan standar peraturan yang berlaku. Sedangkan pihak pertambangan rakyat mengklaim bila melihat dari lokasi penambangannya, kemungkinan mereka sebagai sumber pencemaran sangatlah kecil.

Memang untuk pemecahan permasalahan ini sangat diperlukan adanya penelitian yang obyektif dari suatu tim yang independen, terdiri dari berbagai unsur yang tidak mempunyai kepentingan ekonomi terhadap permasalahan ini. Tapi yang jelas dari mana pun asal dari limbah tersebut, yang sudah pasti bahwa telah terdapat korban dari lapisan masyarakat sekitar yang tentu telah mengalami kerugian materiil dan non materiil yang besar. Dan, ke depannya sangat diharapkan agar proyek ataupun penanaman investasi di suatu daerah harus didahului dengan penelitian studi kelayakan yang tidak hanya memperhatikan satu aspek saja, yaitu aspek ekonomi, tetapi harus memperhitungkan pula aspek sosial, budaya dan lingkungan dari daerah lokasi investasi.

Studi Kelayakan

Kelayakan suatu investasi harus dilihat dari berbagai aspek, bukan hanya melihat dari aspek ekonomi saja. Harus diakui bahwa kegiatan investasi akan mendorong kegiatan perekonomian suatu daerah/negara, sehingga sudah sewajarnya daerah/negara melakukan kebijaksanaan yang bertujuan untuk meningkatkan masuknya investasi.

Manfaat yang bisa didapatkan dari kegiatan suatu investasi yaitu; penyerapan tenaga kerja, peningkatan *output* yang dihasilkan, pe-

ningkatan devisa dan pada akhirnya akan memacu perekonomian di daerah lokasi investasi tersebut.

Hal ini akan terjadi apabila investasi itu dilakukan secara sehat atau secara ekonomi menguntungkan. Mengingat banyak sebab yang mengakibatkan suatu proyek tidak menguntungkan atau gagal, yang disebabkan karena kesalahan dalam perencanaan, kesalahan menaksir pasar, kesalahan pemakaian teknologi ataupun kesalahan dalam memprediksi kebutuhan tenaga kerja. Sebab lainnya; bisa pula akibat perubahan lingkungan, baik lingkungan ekonomi, social ataupun politik serta akibat terjadinya bencana alam.

Untuk meminimalisir kegagalan suatu investasi tersebut maka investor perlu melakukan suatu penelitian pendahuluan atau yang disebut studi kelayakan. Yang dimaksud dengan studi kelayakan adalah suatu penelitian pendahuluan untuk mengkaji tentang peluang keberhasilan atau ketidakberhasilan serta layak tidaknya suatu investasi dilakukan di lokasi tersebut. Pengertian keberhasilan investasi di sini, bisa ditafsirkan secara ekonomi akan menguntungkan ataupun bermanfaat bagi masyarakat.

Kriteria kelayakan melihat dari beberapa penilaian aspek yaitu; aspek pasar, teknis, keuangan, ekonomi, sosial dan lingkungan. Di mana keseluruhan aspek tersebut harus dipakai sebagai kriteria bagi para analis kelayakan investasi tersebut. Walau mungkin saja bagi pihak investor, kriteria kelayakan yang ditekankan adalah aspek ekonominya, sedang aspek sosial, lingkungan dan aspek lainnya merupakan pertimbangan berikutnya. Sedang di pihak lain, bagi pemerintah akan lebih memperhatikan dan membantu investasi yang dirasakan akan memberi manfaat pada masyarakat (aspek sosial).

Kelayakan investasi seringkali lebih mengutamakan kelayakan dari aspek ekonomi saja dan memakai aspek lainnya sebagai pertimbangan selanjutnya, sehingga hal ini akan mengakibatkan seringkali suatu investasi -- terutama investasi fisik -- akan memberikan dampak negatif terhadap lingkungan di sekitarnya. Hal ini akan terjadi apabila investasi

yang dilakukan akan mengeluarkan limbah, polusi ataupun menyebabkan perubahan serta mengganggu keseimbangan alam disekitar lokasi investasi.

Peran Masyarakat

Idealnya, suatu kelayakan investasi disertai dengan analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) untuk wilayah tersebut, seperti yang tercantum pada Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 1999 tentang Amdal, khususnya Pasal 2 Ayat 1 yang menyatakan bahwa; Amdal merupakan bagian kegiatan studi kelayakan rencana usaha dan/atau kegiatan.

Di lain pihak seringkali suatu studi kelayakan hanya dipakai sebagai pembenaran agar suatu investasi dapat dilakukan di suatu daerah, sebab tidak jarang pembuatan studi kelayakan dilakukan sesuai dengan "pesanan" atau kepentingan dari pemesannya atau dilakukan secara subyektif agar menguntungkan pihak investor.

Suatu investasi idealnya selain memberikan manfaat secara ekonomis harus juga bisa memberikan manfaat dari aspek yang lebih luas. Walau penekanan terhadap aspek ekonomi memang sangat penting, karena bagaimanapun manfaat suatu investasi harus memberikan manfaat secara ekonomi, sebab tanpa manfaat ekonomi maka investasi tersebut hanya akan menjadi beban bagi perekonomian daerah tersebut dan masyarakatnya.

Akhirnya peran aktif masyarakatlah yang sangat diharapkan untuk menyaring dan mengawasi suatu investasi, agar kehadiran investasi tersebut tidak hanya melihat keuntungan secara ekonomi saja tanpa memperhatikan akan kerugian dan bahayanya bagi lingkungan sosial, alam dan budaya dari lokasi investasi dalam jangka panjangnya. Di lain pihak pemerintah pun harus tetap memberikan perlindungan dan keberpihakan bagi masyarakatnya apabila terdapat suatu investasi yang merugikan kehidupan (kesehatan) masyarakatnya ataupun merubahakan bagi kelestarian dan keseimbangan alam lingkungan, walau investasi tersebut secara ekonomi sangat menguntungkan bagi perekonomian daerah atau negara tersebut. ***

(Tri Arya Dhyana K, SE MSi adalah ekonom alumnus UGM, tinggal di Denpasar, Bali).

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- INVESTOR IND.
-

KODE: LISTRIK
 MIGAS

GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 24

TAHUN 2004

Hasil Pemeriksaan Unsrat, Warga Buyat Kena Tumor Jinak

JAKARTA (Media): Hasil pemeriksaan Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi (Unsrat), Sulawesi Utara, menyatakan 56 warga di tiga desa di kawasan Ratatotok menderita tumor jinak.

"Berdasarkan pemeriksaan, ada benjol-benjol adalah fakta. Tapi, itu gejala penyakit biasa dan banyak ditemui di daerah lain," ujar Pembantu Dekan Bidang Humas Kerja Sama Fakultas Kedokteran Unsrat Joy Rattu, pada pers di Jakarta, kemarin.

Berdasarkan dua kali pemeriksaan di tiga desa yaitu Buyat, Buyat Pantai, dan Ratatotok, diketahui warga setempat banyak menderita tumor jinak. Pada pemeriksaan pertama di Buyat Pantai dan Buyat Bolaang Mongondow (Bolmon) pada 3 Agustus, dari 264 warga, tercatat 37 di antaranya menderita tumor jinak. Dari sembilan jenis tumor jinak, paling banyak jenis *fibroma* yaitu menyerang tujuh orang.

Sementara pada pemeriksaan kedua, dilakukan di Desa Ratatotok Timur, ditemukan 29 pasien tumor jinak. Namun, Joy buru-buru menambahkan, jenis penyakit itu biasa dan didapati di beberapa daerah lain.

Demikian halnya dengan jenis penyakit lain yang diderita warga, menurut Joy, juga tidak berbeda dengan daerah lain. Menurut hasil diagnosis, tercatat ada 29 jenis penyakit atau keluhan.

Selain tumor jinak, penyakit yang banyak diderita warga di tiga desa itu adalah 86 orang menderita infeksi saluran pernapasan atas (ISPA), 24 orang sakit kepala, 16 orang dermatitis, 12 orang cacangan, dan 12 lainnya kekurangan gizi.

Jenis penyakit tersebut, kata Joy, memang tipikal masyarakat yang tinggal di kawasan kurang

bersih. Tercatat dari total 264 pasien itu, 155 di antaranya adalah dewasa dan 109 pasien anak.

Hal itu diamini Kepala Puskesmas Ratatotok Sandra Rotti. Menurut Sandra, sejak bertugas pada 1999 di daerah itu, penyakit tersebut selalu menjadi keluhan warga. Menurutnya, tak ada keluhan Minamata.

Hanya saja, Sandra mengakui kalau selama ini warga banyak mengeluh menderita kejang atau kram. Namun, sejauh ini hasil diagnosis tidak ditemukan gejala tersebut. "Saat periksa mereka mengeluh pernah kejang-kejang, tapi hasil diagnosa tidak menemukan itu." Demikian halnya soal keluhan neurologis yang banyak diderita warga, menurutnya, masih dalam batas normal.

Itu sebabnya, Sandra membantah pemberitaan di media massa yang menyebutkan adanya gejala kejang-kejang tersebut. "Saya ini kan yang berpengalaman di daerah itu, selama ini memang tidak ada gejala seperti itu."

Begitupun saat *Media* menanyakan soal banyaknya tumor jinak yang diderita warga, Joy membantah ada hubungan dengan pencemaran logam berat di kawasan penambangan PT Newmont Minahasa Raya (NMR).

Sebaliknya, kata Joy, tumor jinak semacam itu akibat penyumbatan lemak semata dan gaya hidup tidak higienis.

Menurut sejarah kasus kesehatan di Ratatotok, jenis tumor serupa bahkan sudah ada sejak 2000 lalu, yaitu di desa Buyat Belang. Namun, saat itu secara ini-

slah, banyak penduduk yang melakukan operasi sendiri. Berkaitan dengan ini, Sandra mengatakan bisa jadi ada kaitannya dengan masalah kesejahteraan keluarga.

Itu sebabnya, pada pemeriksaan lalu, selain mendiagnosis, Tim Fakultas Kedokteran Unsrat juga melakukan operasi pengangkatan tumor. Hanya saja kegiatan operasi yang sedianya dilakukan pada 5 Agustus lalu belum sepenuhnya dilakukan. Sementara di Ratatotok Timur, dari 29 pasien yang menderita tumor, 23 di antaranya sudah dioperasi. Yaitu 15 orang dari Desa Buyat dan 7 orang dari Ratatotok Timur.

Pasalnya, kata Joy, beberapa warga menolak dioperasi setelah diprovokasi beberapa pihak.

Patut diragukan.

Iskandar Sitorus dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kesehatan, menanggapi hasil penelitian tersebut, mengatakan penelitian tersebut patut diragukan.

Ada beberapa alasan yang dikemukakannya. Di antaranya, keliru bila mengatakan kasus penyakit yang diderita masyarakat Buyat sama dengan yang diderita warga lain yang hidup di pantai Indonesia. "Mana ada penelitian dari pemerintah soal itu."

Keberatan lainnya, kata Iskandar, soal sampel darah. Setahuinya, tidak ada warga yang secara sukarela mau memberikan darahnya kepada pejabat pemerintah daerah untuk diperiksa.

Selain itu, tambahnya lagi, penelitian mereka seharusnya dilakukan oleh penelitian dari lembaga Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA) Universitas Indonesia dan Mabes Polri. "Juga, patut dipertanyakan dana penelitian mereka itu dari Newmont," te-

MONITOR BERITA

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> NERACA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA <input type="radio"/> SUARA KARYA	<input checked="" type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH FORUM <input type="radio"/> INVESTOR IND. <input type="radio"/>																																											
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL <input checked="" type="checkbox"/> UMUM																																											
<table border="1"> <tr> <td>JAN</td><td>FEB</td><td>MAR</td><td>APR</td><td>MEI</td><td>JUN</td><td>JUL</td><td>AGST</td><td>SEPT</td><td>OKT</td><td>NOV</td><td>DES</td> </tr> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td> </tr> </table>		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES																																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31														
HALAMAN : 17																																												
TAHUN 2004																																												

Kasus Teluk Buyat

Pemeriksaan Sampel Rambut dan Ikan Harus Objektif

JAKARTA - Pemeriksaan kadar merkuri dan logam berat lainnya dengan sampel ikan dan rambut warga Dusun Buyat Pantai Desa Rata-totok Timur, Kecamatan Rata-totok, Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara, sebaiknya objektif. Untuk sampel diperiksa di berbagai laboratorium, seperti di Swedia dan Jerman. Artinya, tidak hanya diperiksa di National Institute for Minamata Disease di Jepang.

Demikian dikatakan Direktur Pusat Kajian Risiko dan Keselamatan Lingkungan (Puska RKL) FMIPA-UI Dr Budiawan, Jumat (13/8), di Jakarta. Pengiriman sampel tersebut ke Jepang, menurut Menteri Kesehatan dr Achmad Sujudi, untuk memastikan penyakit yang diderita warga Dusun Buyat Pantai. Hasil pemeriksaan kadar merkuri akan diperoleh pada 25 Agustus mendatang. Se-

mentara hasil pemeriksaan logam berat lainnya seperti arsen, cadmium, sianida dan selenium dengan sampel rambut akan berlangsung selama tiga minggu, dan pemeriksaan ikan memakan waktu sebulan.

Seluruh hasil pemeriksaan akan disampaikan ke Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Pasalnya, pemeriksaan merkuri dan logam berat lainnya yang menyertakan ahli epidemiologi dari National Institute for Minamata Disease dr Mineshi Sakamoto PhD difasilitasi WHO. Menurut Mineshi, dia tidak memeriksa sampel darah warga Dusun Buyat Pantai melainkan sampel berupa rambut. Karena sampel rambut lebih menguntungkan. Sampel rambut mudah dibawa dan menggambarkan kadar merkuri dalam jangka waktu lebih lama dibandingkan dengan merkuri di dalam darah.

Dikatakan, dari hasil pengamatannya terhadap kondisi warga Dusun Buyat Pantai pada Selasa (10/8) lalu, penyakit yang dialami warga setempat tidak terkait dengan penyakit minamata. Adapun gejala utama dari penyakit minamata adalah tremor dan ataksia. Dengan demikian sulit untuk saat ini memastikan jenis penyakit yang diderita warga Dusun Buyat Pantai. Oleh karena itu, ujarnya, dia akan memeriksa sampel rambut dan ikan untuk memastikan penyakit warga setempat.

Tidak Stabil

Secara terpisah ahli toksikologi logam berat dari FKM-UI Bambang Wispriono Apt PhD menuturkan, deposit akhir dari merkuri ada pada rambut sehingga dapat menggambarkan merkuri di dalam tubuh. Selain itu kadar merkuri pada rambut su-

dah terstandar. Sementara, kadar merkuri di dalam darah tidak stabil. Artinya tidak menggambarkan merkuri di seluruh tubuh. Merkuri di dalam darah, menurutnya, hanya sebagai bio monitoring, yaitu untuk mengetahui ada atau tidak paparan (*exposure*) merkuri. Ditambahkannya, saat ini belum ada standar merkuri di dalam darah.

Sementara itu Budiawan memaparkan, dari segi metode penelitian dan peralatan yang ada, peneliti Indonesia bisa melakukan pemeriksaan total merkuri dan metil merkuri. Metil merkuri merupakan bentuk dari merkuri yang menyebabkan penyakit minamata.

Menurut dia, sekalipun di Indonesia pemeriksaan yang dilakukan umumnya adalah total merkuri, namun dengan memadukan metode dan instrumen yang ada berupa ato-

mic absorpstion spektrofotometer (AAS) maupun induction couple plasma (ICP) pemeriksaan metil merkuri bisa dilakukan.

Kedua instrumen itu, ujarnya, memiliki kelebihan dan kekurangan. Di samping itu pemeriksaan metil merkuri perlu didukung referensi metil merkuri. Artinya, metode pemeriksaan metil merkuri yang ada bisa diadopsi. Budiawan menilai pengiriman sampel ke Jepang oleh pemerintah merupakan masalah kebijakan. Pasalnya, banyak ahli kimia di Indonesia yang mempunyai kemampuan untuk memeriksa logam berat di dalam tubuh manusia.

Mudah-mudahan hasil yang dicari bisa menjadi solusi, bukan perdebatan *capable*. Dibanding Jepang dan Amerika memang peralatan mereka lebih bagus dan terbaru. (N-4)

58

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- INVESTOR IND.
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 UMUM

JAN		FEB		MAR		APR		MEI		JUN		JUL		AGST		SEPT		OKT		NOV		DES								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

HALAMAN: B6 TAHUN 2004

Gara-gara Newmont, Warga Terbelah

Minggu (15/8) siang, Robert Sasuwuhe berjalan menyalisir pantai. Tak ada sapaan tetangga atau warga lain. Bahkan Robert terkesan menjauhi tetangga. Ketika diminta untuk wawancara di pantai, pria berusia 51 tahun ini bungkam. Kakinya terus melangkah menuju rumahnya, di ujung Desa Buyat Pantai.

Buyat Pantai menjadi sangat populer belakangan ini akibat warganya yang terkena penyakit kulit dan benjol-benjol. Diduga penyakit tersebut karena pencemaran limbah yang menyeret-nyeret PT Newmont Minahasa Raya yang membuang tailingnya di dasar perairan Teluk Buyat. Tuduhan yang masih ditunggu kepastian kebenarannya sampai saat ini.

Sementara itu, tak jauh dari rumahnya, hanya sekitar 10 meter, puluhan warga sedang berkumpul. Di bawah tenda terpal di halaman rumah M. Lombonaung Tadete, warga sibuk membicarakan nasib mereka. Salah seorang warga mendukung alternatif bantuan yang ditawarkan sebuah komite

kemanusiaan dari Jakarta untuk memindahkan permukiman ke tempat lain, masih di perairan pantai Sulawesi.

"Daripada kami mati di sini dan hanya mengandalkan bantuan," ujarnya. Seorang warga perempuan yang sudah berusia lanjut juga mendukung rencana pindah tempat tinggal itu, meski mengaku sangat berat harus meninggalkan rumah semipermanennya, dia tetap mau ikut relokasi.

Tetapi, Robert tidak tergabung bersama mereka. Robert masih asyik melayani pertanyaan-pertanyaan yang diajukan rombongan wartawan yang datang ke lokasi dengan *badge visitor* PT NMR. Bukan tidak sengaja Robert tidak mengikuti forum sederhana itu. Tetapi, memang Robert dan tiga kepala keluarga lainnya mengaku dimusuhi sebagian besar warga.

Sejak muncul isu pencemaran, warga desa yang jumlahnya hanya sekitar 248 jiwa ini memang menjadi seperti terbelah. Pro dan kontra terhadap PT NMR. Seperti Robert, dia mempertanyakan motivasi sebagian besar warga

yang memilih tidak lagi melaut dan menggantungkan hidup sehari-hari pada bantuan yang datang. "Mereka bukannya tidak berani melaut (karena pencemaran), tetapi tidak mau," ujarnya. "Saya sendiri masih sehat dan makan ikan," dia menambahkan.

Buntutnya bisa ditebak. Robert mengaku, adanya berbagai ancaman yang kini mewarnai hidupnya di desa bekas deng, istilah setempat untuk persinggahan nelayan sebelum melaut, sejak 1998.

Dia lalu menunjuk rumah tetangganya yang begitu sunyi. "Sejak kemarin, sepulangnya dari Jakarta, dia tidak pernah keluar rumah (tidak mau memenuinya lagi)," ujarnya. Padahal, jarak kedua rumah hanya beberapa langkah kaki, yang dibatasi pagar dari barisan batang pohon tembakau. Rumah sebelah itu didiami oleh Rasyid yang belum lama ini menjalani operasi di tengkuknya terkait dengan isu pencemaran.

"Sekarang saya ke mana-mana tidak berani meninggalkan pisau," kata Robert sambil meraba ke balik kaus lengan panjangnya. "Saya lebih baik

membunuh terlebih dulu sebelum dibunuh," kata dia setengah berbisik.

Lalu, apa yang membuat Robert rela bertentangan dengan sebagian besar warga? "Saya hanya ingin mencari nafkah secara wajar, sekali melaut—sekitar empat jam—saya dapat menghasilkan Rp 40 ribu," kata dia sambil membanggakan bangunan rumahnya yang sudah berding tembok seluruhnya. "Saya sendiri ingin tahu sampai sejauh mana terjadinya pencemaran," dia menambahkan.

Berbeda dengan orang dewasa yang sedang penuh kebencian, anak-anak seolah tak peduli dan tetap bermain dengan gembiranya di pantai, tak jauh dari tempat pertemuan. Bahkan meski benjolan ada di tubuh seorang bocah, seolah itu tak mengusiknya. Bocah berusia 8 tahun itu, Faisal, malah dengan "bangga" menunjukkan benjolan sebesar jambu biji muda di balik lutut kanannya. Benjolan itu pula yang selama ini menjadi subyek kontroversi terjadinya pencemaran karena pihak PT Newmont menganggap benjolan itu sebagai penyakit kulit biasa yang disebabkan

cara hidup nonhigienis.

"Cuma dia ini (Faisal) yang sampai sekarang masih makan ikan. Kita semua sudah tidak mau makan ikan, sudah lebih dari dua bulan," celetuk seorang bocah perempuan 11 tahun, Nurjana. Yang lain pun *nimbrung*. "Ya nih, yang ini," sambil serentak menunjuk Faisal. Tetapi, yang ditunjuk hanya cengar-cengir. "Ya, tapi hanya ikan yang ditangkap jauh di sana," kata Faisal menunjuk ke arah perairan, agak ke tengah laut.

Selain orangtua Faisal, bocah lainnya mengakui bahwa orangtuanya sudah tidak pergi melaut lagi. "Bapak sekarang bekerja menjadi sopir bentor," kata Nurjana menunjuk sebuah becak motor yang melintasi jalan tidak jauh dari pantai.

Mereka menjawab fasih isu pencemaran yang sedang melingkupi desanya, termasuk istilah-istilah merkuri dan Newmont. Tetapi, selebihnya mereka hanya minta difoto sambil berjongkir balik. Khas keceriaan anak-anak. ● wuragj

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- INVESTOR IND.
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL **AGST** SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 **19** 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 29

TAHUN 2004



KOMPAS/PRASETYO EKO P

Bekas Sawah — Tambang batu bara ini dulunya adalah lahan pertanian yang menghijau di kawasan sentra padi Kalimantan Timur di Desa Kertabuana, Kutai Kartanegara. Karena lahan pertanian digusur untuk pertambangan, saluran irigasi bernilai miliaran rupiah pun tidak berguna. Bahkan, pembangunan irigasi yang sedang berlangsung juga dihentikan.

Sawah Digusur Tambang, Bendungan Irigasi Dihentikan

TENGGARONG, KOMPAS — Akibat sawah yang akan diiri digusur tambang batu bara, bangunan air senilai sekitar Rp 29 miliar di Separi, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, terbengkalai dan dihentikan pembangunannya. Bendungan irigasi itu direncanakan bisa mengairi sawah seluas 1.400 hektar.

Dari pantauan Kompas, Rabu (18/8), sawah di Desa Kertabuana, yang rencananya akan mendapat pengairan dari bendungan itu sebagian telah berubah menjadi tambang batu bara. Padahal, sekitar enam bulan yang lalu, sawah-sawah di desa transmigran yang sebagian be-

sar asal Bali itu masih tampak menghijau. Saat ini, galian tambang batu bara sedalam belasan hingga puluhan meter dengan truk dan alat berat hilir mudik mengeruk batu bara di bekas areal persawahan.

Kondisi sekitar desa, yang sebelumnya menghijau dengan tanaman padi dan pohon kelapa di pematangnya, telah berubah menjadi gersang dan berlubang-lubang. "Selain sawah, sebentar lagi desa kami juga segera digusur," kata Kadek, salah seorang warga Kertabuana.

Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kalimantan Timur (Kaltim) Purwanto membenarkan,

akibat penggusuran lahan sawah di Kertabuana itu, pembangunan bendungan irigasi di Separi senilai sekitar Rp 29 miliar terpaksa dihentikan. "Itulah jika perencanaan pembangunan tidak terintegrasi. Akhirnya bangunan air itu menjadi mubazir," katanya.

Menurut Purwanto, bendungan irigasi itu direncanakan mampu mengairi areal sawah seluas sekitar 1.400 hektar. Akan tetapi, akhirnya menjadi sia-sia karena lahan sawah milik warga yang direncanakan mendapat pengairan dari bendungan itu telanjur berubah menjadi tambang batu bara.

Purwanto menambahkan,

bendungan irigasi sudah terlanjur dalam proses pengerjaan. Akan tetapi, karena di sekitar kawasan tersebut oleh pemerintah kabupaten justru ditetapkan sebagai kawasan tambang batu bara, akhirnya proyek Provinsi Kaltim untuk membangun bendungan terpaksa dihentikan. Bangunan bendungan irigasi yang sudah telanjur dikerjakan akhirnya menjadi terbengkalai.

"Padahal, bendungan itu sudah dikerjakan. Ya, akhirnya terbengkalai," ujar Purwanto. Lebih lanjut, Purwanto mengatakan, untuk memindahkan bendungan itu sudah tidak memungkinkan lagi. (RAY)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- INVESTOR IND.
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 8

TAHUN 2004

TAJUK RENCANA

RAPBN dan Pilpres

ADA yang istimewa dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2005 yang disampaikan Presiden Megawati Soekarnoputri, Senin (16/8). Istimewanya, RAPBN itu diracik oleh pemerintahan yang sekarang, sementara pelaksanaannya adalah pemerintahan baru hasil Pemilu Presiden (Pilpres) 20 September 2004 nanti. Hal itu terjadi sebagai konsekuensi dari pelaksanaan amanat konstitusi.

Tentu sejak awal sudah ditegaskan bahwa pemerintahan baru nanti berhak untuk merevisinya. Tapi hal itu tidak mudah karena pemerintah baru hanya punya waktu tak lebih dari tiga bulan. Karena itu, RAPBN yang disusun dan diajukan oleh Pemerintahan Megawati ke DPR sangat diharapkan serealistis mungkin supaya tidak menyulitkan pemerintahan mendatang untuk mengimplementasikannya.

Hal yang istimewa lainnya adalah penyusunan RAPBN 2005 dilakukan di tengah suasana pilpres. Tentunya angka-angka yang disajikan oleh Pemerintahan Megawati dijadikan tolok ukur oleh publik, sejauh mana Megawati konsisten dengan janji-janjinya sebagai salah satu calon presiden (capres) yang akan bertarung pada pilpres putaran kedua nanti.

SUDAH lumrah pada setiap penyampaian RAPBN, pemerintah selalu menuai kritik, terutama dari kalangan ekonom. Mereka menilai, baik asumsi maupun besaran yang ditetapkan tidak realistis sehingga RAPBN sulit diimplementasikan. Penetapan asumsi yang mendasari penyusunan besaran RAPBN 2005, banyak yang bertolak dengan realitas. Di antaranya patokan nilai tukar Rp 8.600 per dolar AS, dinilai jauh dari realitas karena saat ini berada pada kisaran Rp 9.200 per dolar AS. Demikian juga asumsi suku bunga 6,5 persen, lebih rendah dari asumsi APBN 2004, yaitu 8,5 persen, dinilai tidak akan mampu melawan pengaruh trend

suku bunga global yang saat ini meningkat. Penilaian yang sama juga ditujukan pada asumsi harga minyak dunia yang dipatok di posisi US\$ 24 per barel. Padahal saat ini harga minyak telah melampaui US\$ 45 per barel, bahkan pemerintah juga mengambil ancang-ancang untuk merevisi asumsi harga minyak pada APBN 2004, dari US\$ 22 menjadi US\$ 34 per barel.

Dalam kaitan pilpres, masyarakat tentu akan mencermati kebijakan Pemerintahan Megawati untuk merealisasikan semua janji yang disampaikan saat kampanye lalu. Janji yang dapat diukur melalui RAPBN antara lain pengurangan pengangguran dan meningkatkan kesempatan pendidikan. Tahun 2005, pemerintah menargetkan pertumbuhan 5,4 persen. Sekali lagi, asumsi pertumbuhan itu pun dinilai tidak realistis. Sebab di tengah anggaran yang minim, pemerintah jelas tidak memiliki cukup ruang untuk melakukan ekspansi ekonomi yang mampu mendorong pertumbuhan. Dengan kata lain, kesempatan kerja belum cukup terbuka bagi masyarakat seperti diakui Presiden Megawati dalam pidatonya Senin lalu, RAPBN 2005 belum mampu mengurangi pengangguran dan kemiskinan secara berarti.

PELAKSANAAN pilpres tahun ini memunculkan kerawanan dalam penyusunan RAPBN. Kita tentu tidak ingin pilpres mengurangi kecermatan pemerintah dalam menyusun RAPBN, hanya karena diberikannya peluang bagi pemerintah mendatang untuk merevisinya.

Kita juga akan sangat khawatir, apabila RAPBN lantas dijadikan komoditas politik, dengan menawarkan hal-hal yang populis kepada masyarakat menjelang pilpres, tanpa memperhitungkan daya dukung anggaran, serta pengaruh lingkungan ekonomi domestik dan internasional. Sebab harap tetap diingat, RAPBN adalah pedoman bagi Bangsa Indonesia menapaki perjalanan setahun ke depan.

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- INVESTOR IND.
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 7

TAHUN 2004

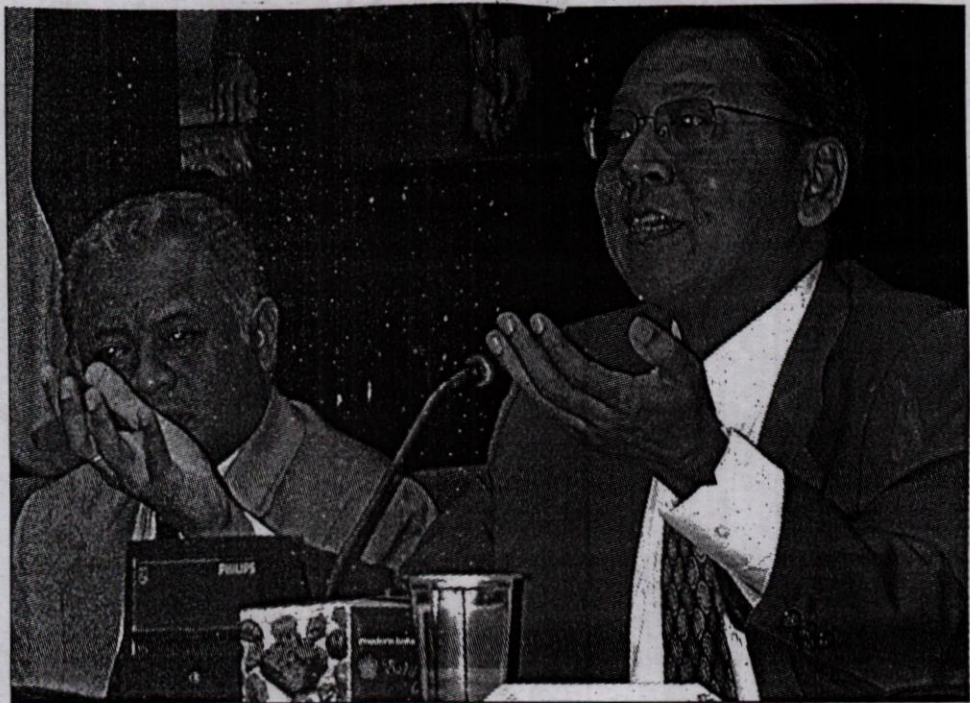
RI Tak Minta Penjadwalan Utang ke IMF

IMF Mendukung Upaya Pemerintah Membayar Utang LN Sesuai Jadwal

JAKARTA - Keinginan Indonesia agar Dana Moneter Internasional (IMF) memprakarsai penjadwalan ulang (*rescheduling*) utang tidak akan dilakukan secara resmi dengan lembaga itu. Keinginan itu lebih ditujukan kepada negara-negara anggota IMF yang memberikan utang kepada Indonesia.

Menko Perekonomian Dorodjatun Kuntjoro-Jakti di Jakarta, Selasa (17/8) mengatakan, pihaknya menyadari bahwa *rescheduling* dengan lembaga-lembaga multilateral, seperti IMF dan Bank Dunia, tidak pernah dilakukan. Terlebih Indonesia sudah masuk program lanjutan seperti Paris Club I dan II (forum pembahasan utang bersama negara kreditor) serta London Club (forum pembahasan utang dengan kreditor perbankan internasional), yang sebetulnya juga sama dengan program-program IMF.

Karena itu yang diupayakan Indonesia adalah penjadwalan ulang utang melalui hubungan-hubungan bilateral dengan negara-negara anggota IMF yang bersedia menempuh jalur di luar pola kerja sama yang klasik. "Sejauh ini langkah itu sudah dilakukan, karena anggaran kita sangat mepet. Sebanyak sepertiga anggaran kita digunakan untuk membayar bunga dan angsuran utang. Sedangkan sepertiga lainnya harus ditransfer ke daerah, dan baru sepertiga sisanya diguna-



PEMBARUAN/WICAKSONO DANIEL P

RAPBN 2005 - Menteri Keuangan Boediono (kanan) didampingi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro memberikan penjelasan seputar RAPBN 2005 di Gedung Departemen Keuangan, Jakarta, Senin (16/8).

kan untuk membiayai program," kata Dorodjatun.

Presiden ingin agar ada penjadwalan pembayaran hutang karena pada tahun depan, karena sisa dana yang digunakan untuk membiayai program semakin kecil, setelah sebagian besar di antaranya ditransfer ke daerah. "Bayangkan saja, tahun lalu jumlah anggaran yang dikirim ke daerah Rp 120 triliun. Tahun ini masih sama, tapi pada tahun depan sudah mencapai Rp 132 triliun," tambahnya.

Penjadwalan ulang utang, lanjut Menko, tidak boleh diartikan Indonesia tidak mau

membayar utang. "Kita tetap mau membayar, tetapi kita ingin mempunyai uang yang lebih banyak untuk membangun infrastruktur, membiayai kesejahteraan sosial dan sebagainya," ujarnya.

Dia yakin permintaan Indonesia bisa direalisasi, karena sejauh ini pemerintah sudah mendatangi beberapa negara untuk meminta *debt swap* (konversi utang dengan program tertentu), bahkan meminta hibah.

Secara terpisah, Sekretaris Negara Bambang Kesowo mengatakan, Pemerintah Indonesia tidak meminta penjadwalan ulang utang kepada

IMF. "Dalam pidato itu Presiden hanya mengungkapkan bahwa IMF secara eksplisit pernah mengakui kekeliruannya dalam memberi rekomendasi kepada Indonesia, sehingga mereka meminta maaf.

Presiden menanggapi, hal itu memang terjadi dan sekarang kita harus menyelesaikan akibat-akibatnya. Kalau mengakui kekeliruan, mestinya lebih baik kalau IMF juga mau mempertimbangkan penjadwalan ulang. Tapi sebenarnya kita tidak minta," katanya.

Sebelumnya, dalam pidato kenegaraannya, Presiden

Megawati Soekarnoputri mengatakan, akan sangat wajar bila IMF secara profesional dan proaktif mengambil langkah perbaikan (*remedial actions*), antara lain dengan mengambil langkah-langkah yang dapat membantu meringankan utang Indonesia yang timbul sebagai akibat kekeliruan rekomendasi kebijakan itu. Dalam hal ini setidaknya IMF bersedia memprakarsai penjadwalan ulang cicilan utang-utang Indonesia, agar tersedia lebih banyak dana untuk membangun kesejahteraan rakyat.

Sementara itu, dalam siaran pers Kantor Perwakilan IMF di Jakarta, lembaga keuangan internasional itu menjelaskan, apa yang dikemukakan oleh Presiden Megawati dalam pidato kenegaraan, hanya berupa kemungkinan untuk melakukan *rescheduling* utang.

Hal itu sudah diklarifikasi oleh Menteri Keuangan Boediono bahwa yang dimaksud dengan hal itu adalah *rescheduling* utang melalui Paris Club selama tahun 1998 hingga 2003 lalu, dan tidak ada niat untuk melanjutkannya pada tahun 2005.

"Kami mendukung pemerintah untuk melanjutkan pembayaran kembali utang luar negeri sesuai dengan jadwal, baik kepada IMF maupun kepada kreditor-kreditor lain, sebagaimana layaknya demi kepentingan ekonomi Indonesia," jelas IMF.

IMF kembali mengakui adanya kesalahan dalam penerapan kebijakan ekonomi di Indonesia pada tahun 1997 hingga awal tahun 1998. Tetapi hal itu hanya akan dijadikan pelajaran untuk memperkuat kelangsungan tugas lembaga keuangan itu ke depan.

Berharap IMF Lunak

Pandangan berbeda dinyatakan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Kwik Kian Gie. Menurutnya, dengan keluarnya pernyataan resmi pemerintah, IMF sebaiknya menunjukkan sikap lunak dengan berupaya memperjuangkan penjadwalan kembali pembayaran utang pemerintah.

"Pokoknya kita berharap IMF bisa bersikap lebih lunak. Kita lihat saja bagaimana tanggapan mereka nanti," kata Kwik, Senin (16/8).

Menurut dia, sikap IMF yang melunak bisa ditunjukkan melalui upaya membantu penjadwalan utang Indonesia, setelah pada 2004 dan 2005 mendatang tidak lagi memperoleh fasilitas *rescheduling* utang melalui Paris Club. Namun, dia belum bisa menjelaskan langkah-langkah konkret yang akan ditempuh pemerintah seiring dengan dikeluarkannya pernyataan itu.

Sementara Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Meneg BUMN) Laksamana Sukardi menilai, pernyataan Presiden Megawati yang meminta IMF bertanggung jawab dengan melakukan penjadwalan ulang utang Indonesia merupakan sebuah pernyataan yang cerdas.

"Kita memang sudah menyelesaikan kerja sama, tapi kita berharap mereka (IMF) juga mempertimbangkan kesalahan mereka dan menerima saran kita untuk melakukan *rescheduling* utang, karena ini merupakan beban kesalahan mereka juga, dan ini merupakan *statement* politik resmi Presiden," ujar Laksamana.

(K-10/B-15)

MONITOR BERITA

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> NERACA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA <input type="radio"/> SUARA KARYA	<input checked="" type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH FORUM <input type="radio"/> INVESTOR IND. <input type="radio"/>
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL <input checked="" type="checkbox"/> UMUM
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 HALAMAN : 6 TAHUN 2004	

Susutnya DAS Brantas dan Derita Petani

MUSIM kemarau yang semakin terasa di wilayah daerah aliran sungai (DAS) Brantas dan juga DAS-DAS lainnya di Jawa Timur (Jatim), termasuk DAS Bengawan Solo, ditandai dengan semakin mengeringnya hampir seluruh waduk di beberapa tempat, utamanya di kawasan Jatim bagian selatan.

Di DAS Brantas, misalnya, volume air di Waduk Karangates, Lahor, Selorejo, Sengguruh, Lodooyo, Wlingi dan Widas semakin menyusut. Sebab, pasokan air dari hulu Sungai Brantas di sepanjang wilayah eks Karesidenan Malang dan Kediri menurun tajam.

Padahal selama ini DAS Brantas memikul sejumlah fungsi strategis. Pengembangannya dalam 20 tahun terakhir diarahkan sebagai pengendali ancaman banjir. Keberadaan sejumlah waduk mampu mempersempit luasan daerah rawan banjir, dari semula 53.805 hektare (ha), menjadi tinggal seperlimanya saja.

Lebih dari itu, waduk-waduk tersebut juga mampu dijadikan sumber Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), pemasok bahan

baku air minum, serta kawasan usaha perikanan darat, obyek pariwisata dan olahraga air.

Selain itu, juga difungsikan sebagai tandon pemasok air irigasi teknis terbesar di Jatim, yang terbukti mampu menaikkan produksi padi, dari rata-rata sekitar 2 juta ton menjadi lebih dari 2,5 juta ton.

Sayangnya, sebagian besar penduduk yang menjadikan Brantas sebagai salah satu sumber hidup, sejak tahun 1999 harus menanggung derita menyusul banjir besar dan tanah longsor, akibat penggundulan hutan.

Penduduk setempat juga harus menanggung dampak dari penyerobotan hutan, penyempitan alur sungai untuk keperluan permukiman, pembuangan limbah cair dari sejumlah industri maupun limbah domestik rumah tangga, serta perubahan peruntukan lahan. Hal-hal tersebut memberi kontribusi pada rusaknya ekosistem di DAS Brantas.

Banyak pakar dari lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang peduli terhadap masalah lingkungan berpendapat, bahwa rusaknya ling-



PEMBARUAN/ARIES SUDIONO

MENYUSUT – Akibat percepatan sedimentasi di Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas, Bendungan Sutami yang memiliki kapasitas menampung air sekitar 343 juta meter kubik kini volume airnya menyusut tajam. Akibatnya, belasan juta penduduk di sepanjang DAS Brantas terancam kekurangan air, terutama di musim kemarau.

kungan akibat pertambahan jumlah penduduk relatif cepat, sehingga membutuhkan lahan permukiman, prasarana jalan, dan lahan

pertanian. Kondisi itu memaksa penggusuran luasan kawasan hutan.

Perubahan ekosistem DAS Brantas tersebut, menyebabkan wilayah

sekitarnya menjadi daerah yang gersang dan rawan banjir serta rawan tanah longsor. Akibat lain dari rusaknya ekosistem, juga menurunkan volume dan kualitas air.

Gundulnya hutan di DAS Brantas, termasuk rusaknya taman-taman hutan rakyat (Tahura), pada gilirannya menjadi penyumbang utama meningkatnya sedimentasi (pendangkalan).

Akibat percepatan sedimentasi DAS Brantas, menyebabkan Bendungan Sutami yang semula memiliki kapasitas volume air sekitar 343 juta meter kubik, kini terus menurun.

pengangguran tak kentara di musim kemarau, memang tidak terlalu mencolok dibanding nasib petani di DAS Bengawan Solo dan DAS Madiun.

Sebab mereka masih dapat menggunakan pompa-pompa pantek (sumur bor di areal persawahan dengan kedalaman 25 meter hingga 40 meter) untuk mendapatkan pasokan air, walaupun dalam volume yang relatif sangat terbatas.

Dari sekitar 346 ribu hektare (ha) areal persawahan di DAS Brantas, kini diperkirakan tinggal dua pertiganya yang dapat digarap dengan pasokan air yang sangat terbatas.

Akibatnya sebagian petani lantas memilih *mboro* (alih profesi dengan hijrah ke kota lain), kendati dalam waktu yang terbatas.

Dibanding dengan DAS Brantas, kondisi DAS Madiun terlihat lebih memprihatinkan. Menyusutnya volume Sungai Madiun, yang merupakan anak Sungai Bengawan Solo, kini mengancam para petani di Madiun dan sekitarnya.

Tiga waduk di wilayah Madiun, yakni Waduk Dawuhan di daerah Wonoasri, Waduk Notopuro di Pilangkenceng dan Waduk Saradan di Saradan, praktis kekurangan air. Hanya Waduk Dawuhan yang masih menyisakan air.

Namun jika dalam waktu dekat tidak turun hujan, dipastikan waduk yang selama ini memasok air irigasi bagi lahan persawahan teknis seluas 1.675 ha, bakal mengering:

Kondisi sebagaimana yang terjadi di Madiun juga sudah dirasakan para petani di hilir DAS Bengawan Solo, yakni di sepanjang wilayah Karesidenan Bojonegoro yang meliputi Bojonegoro, Lamongan, Gresik dan sebagian Sidoarjo. Pasokan air dari Bengawan Solo juga menyusut drastis.

Bagi petani yang memiliki pompa pantek, lahan persawahan teknis mereka hanya mampu ditanami palawija. Kalaupun dipaksakan, mereka tetap dapat menanam padi bibit tertentu dalam lahan yang sangat terbatas. Ancaman kekeringan tersebut, pada gilirannya akan berdampak pada sumbangan Jatim untuk menunjang stok beras nasional. ♦

Ancaman Kekeringan

Penurunan volume air waduk sebagai akibat menurunnya kemampuan fungsi penahan air, telah mengganggu fungsi PLTA, pendistribusian air untuk keperluan irigasi teknis bagi jutaan petani, serta pemenuhan kebutuhan air bagi penduduk di sekitarnya.

Upaya reboisasi secara besar-besaran yang pernah dilakukan belasan tahun silam oleh Proyek Induk Pengembangan Wilayah Sungai Brantas, seakan tak ada artinya. Bahkan kondisinya lebih parah dan sangat memprihatinkan.

Ancaman kekeringan yang mengakibatkan para petani di sepanjang DAS Brantas menjadi

PEMBARUAN/
ARIES SUDIONO